

Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas SDM, Penerapan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Yunita Althin Natanael¹, Edi Jamaris²

Program Studi Akuntansi, Universitas Gunung Leuser Aceh, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 9 April 2023

Revised: 16 Mei 2023

Accepted: 28 June 2023

Keywords:

SAP Implementation,
HR Quality,
SPIP Implementation,
Financial Report Quality

Correspondence:

Yunita Althin Natanael
yunitaalthin85@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas sumber daya manusia, dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) melalui perangkat lunak SmartPLS 3.0, penelitian ini mengungkap bahwa ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP yang baik, didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai dan implementasi SPIP yang efektif, secara bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan aspek sistem akuntansi, kapasitas SDM, dan pengendalian internal sebagai pilar utama dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sistem akuntansi, meningkatkan kompetensi aparatur, dan mengoptimalkan fungsi pengendalian internal guna mencapai tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

This study aims to analyze the influence of the implementation of the Government Accounting System (SAP), the quality of human resources, and the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) on the quality of financial statements of the Regional Government of Southeast Aceh Regency. Using a quantitative approach with Structural Equation Modeling based on Partial Least Squares (SEM-PLS) through the SmartPLS 3.0 software, the study reveals that all three variables have a positive and significant effect on the quality of financial statements. The findings indicate that the proper implementation of SAP, supported by adequate human resource quality and effective SPIP implementation, collectively contribute to improving the quality of regional government financial reporting. These results highlight the importance of strengthening accounting systems, human resource capacity, and internal controls as key pillars in realizing regional financial accountability. Practically, this study provides recommendations for local governments to continuously improve accounting systems, enhance the competencies of government personnel, and optimize internal control functions to achieve transparent and accountable financial governance.

This is an open-access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Pendahuluan

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus-kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini merupakan bukti dari kurangnya pemahaman standar akuntansi pemerintah dan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah, kurangnya kompetensi yang dimiliki staf akuntansi, sistem pengendalian intern yang tidak memadai serta buruknya pengelolaan barang milik daerah (BMD), sehingga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah.

Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan dikarenakan auditor

pemerintah mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa akun yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang belum memadai dan kurangnya kompetensi staf akuntansi yang ada serta pengelolaan BMD yang tidak baik.

Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2018).

Dalam pengelolaan keuangan pusat dan daerah, pemerintah mengeluarkan aturan terkait berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah harus menyusun laporan keuangan yang nantinya diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan SAP.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Di dalamnya SAP dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang penyajiannya terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Tujuan dari Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Menurut PP 71 tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki 4 (empat) karakteristik yakni: (1) Relevan/Relevance, (2) Andal/Realinility, (3) Dapat dibandingkan/Comparability, dan (4) Dapat dipahami/Understandability. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik yaitu: Penyajian Jujur, Dapat Diverifikasi, Netralitas.

Kualitas laporan keuangan salah satunya dipengaruhi oleh pemahaman tentang peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang dimaksud adalah PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sangat diperlukan untuk menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel serta pengukuran kinerja yang lebih baik, selain itu juga untuk memfasilitasi manajemen aset agar lebih transparan dan akuntabel

Keterbatasan SDM berkualitas dan memahami perubahan peraturan serta menguasai mekanisme penyusunan laporan keuangan menjadi kendala pada Pemkab Aceh Tenggara. Saat ini ASN yang mempunyai latar belakang pendidikan Akuntansi hanya sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Selain itu pendistribusian ASN di tiap SKPD belum merata dan tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dalam menduduki jabatan, khususnya untuk jabatan kepala sub bagian keuangan hal ini menjadi penting dikarenakan kasubbag keuangan juga berfungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD yang mempunyai tugas sebagai penyusun laporan keuangan di SKPD.

Salah satu faktor utama agar kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan adalah pengawasan intern. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Djarwanto, 2011). Tahap pengawasan, seharusnya dapat menjamin semua proses kegiatan di pemerintahan berjalan efisien, efektif serta ekonomis sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengawasan dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Penggunaan teknologi informasi juga turut mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian (Yosefrinaldi, 2013) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan. Teknologi informasi telah menjadi pilihan utama untuk menciptakan sistem informasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan yang semakin ketat saat ini. Dengan kemajuan teknologi saat sekarang ini, baik pemerintah pusat maupun daerah sudah meninggalkan sistem manual dan beralih ke sistem yang terkomputerisasi serta memanfaatkan jaringan internet untuk menghubungkan antar SKPD maupun dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian/lembaga.

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini pendekatan penelitian peneliti menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 54 (lima puluh empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat, dan Kecamatan dan masing-masing SKPD diambil 3 (tiga) orang yaitu: kasubbag keuangan selaku PPK-SKPD atau pembantu PPK-SKPD, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara dan Pengurus Barang serta 5 (lima) orang auditor Intern pada Pemkab Aceh Tenggara sehingga populasi berjumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan). Metode pengumpulan data yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan angket kuesioner. Penelitian ini menggunakan metodologi *Partial Least Square* (PLS). Mengolah data serta menarik kesimpulan maka peneliti menggunakan program SmartPLS versi 3.0.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 1. Uji *Path Coefficient*

Variabel	Coefficient	T Value
Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan	0,150	2.896
Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	0,175	4.574
SPIP-> Kualitas Laporan Keuangan	0,091	2.888

Skema Penelitian Struktural SEM-PLS menjelaskan bahwa nilai *path coefficient* variabel Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan sebesar 2.896, Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan 4.574, SPI -> Kualitas Laporan Keuangan 2.888. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa variabel dalam model ini faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan menunjukkan arah yang positif.

Uji Goodness of Fit

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan program SmartPLS 3.0 diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

Tabel 2. *R-Square*

Variabel	R Square
Kualitas Laporan Keuangan	0.717

nilai *R-Square* yang diperoleh adalah 0.717 untuk variabel kualitas laporan keuangan. nilai tersebut menginterpretasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan hanya mampu menjelaskan varian kualitas laporan keuangan sekitar 71,7%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini

Tabel 3. *Dirrect Effect*

Variabel	T Statistics	Values
Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan	2.896	0.004

Variabel	T Statistics	Values
Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan	4.574	0.000
SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan	2.888	0.000

- 1) Variabel Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.072 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Variabel Kapastias SDM -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.134 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 3) Variabel SPIP-> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.071 dan P-Value 0.000 (>0.05), artinya memiliki sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- 4) Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.157 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
- 5) Variabel Pengelolaan Barang Milik Daerah-> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.778 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya Pengelolaan Barang Milik Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan nilai Penerapan SAP -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.072 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan arah yang positif, maka hipotesis pertama “diterima”.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Sedangkan nilai cross loading tertinggi pada variabel penerapan SAP terdapat pada indikator basis akuntansi yang digunakan dengan item pernyataan dengan nilai cross loading sebesar 0,814 Laporan Keuangan Pemkab Aceh Tenggara disusun dan disajikan berdasarkan SAP dan tertuang dalam Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa Pemkab Aceh Tenggara telah menyajikan Laporan keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pemkab Aceh Tenggara yang telah diaudit dapat bermanfaat bagi semua pihak pengguna laporan tersebut, walaupun Pemkab Aceh Tenggara sering mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan

Dalam ketentuan umum PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang harus dipenuhi yang mengikat secara hukum dan dirancang dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

SAP wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pencapaian transparansi dan akuntabilitas. SAP dapat dijadikan jembatan untuk menyatukan persepsi antara penyusun dan penyaji, pengguna/stakeholders dan auditor.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, pemerintah harus secara konsisten menerapkan SAP, sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat. Penerapan SAP dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan juga dapat meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi. Dengan demikian penerapan SAP dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan akan berdampak semakin berkualitasnya laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Irwan, 2011), dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, (Armando, 2013), menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Aryani, 2013) juga menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (Aryani, 2013), (Saragih, 2007), (Sukmaningrum, 2012), (Mulyani, 2014) membuktikan dalam penelitiannya bahwa Penerapan SAP, Kualitas SDM, SPI, Komitmen Organisasi dan Teknologi Informasi secara simultan dan Parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Kualitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Variabel Kapasitas SDM -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.134 dan P-Value 0.000 (<0.05), artinya kapasitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya menganggur dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009). Kapasitas SDM adalah kemampuan seseorang/individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Kualitas/Kapasitas SDM merupakan kemampuan dari seseorang/individu di dalam suatu organisasi atau kelembagaan maupun di dalam suatu sistem untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangannya yang ada padanya dalam upaya mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien (Urban, n.d.).

Dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi ini dapat diperoleh baik dari pendidikan maupun dari bimbingan teknis dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai negeri sipil.

Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, pemerintah membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi dan ketrampilan yang memadai terutama yang memahami akuntansi, pengelolaan keuangan dan peraturan yang berlaku terutama SAP. Dengan adanya SDM yang berkompeten serta mampu memahami logika akuntansi yang baik akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian SDM yang berkualitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wansyah, H., Darwin, & Bakar, 2012), (Sari, Martani, & Setyaningrum, 2015), (Syarifudin, 2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh Kapasitas sumber daya manusia, Nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh teknologi informasi. Nilai informasi laporan keuangan SKPD dipengaruhi oleh kegiatan pengendalian.

Pengaruh Penerapan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Variabel SPIP -> Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur 0.071 dan P-Value 0.000 (>0.05), artinya memiliki sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP).

Salah satu tujuan dari SPI menurut (Warren. C.S, 2009) adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan adanya sistem informasi akuntansi, kekeliruan dan kesalahan dalam perhitungan dapat diminimalisir. Agar sistem yang dibangun berkualitas, maka setiap bagian dari sistem tersebut harus terintegrasi dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diantara bagian dari sistem yang mempunyai tugas memperlancar jalannya Sistem Informasi Akuntansi adalah pengendalian intern. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tidak terlepas dari SPIP yang baik. Dengan meningkatkan kualitas SPIP diharapkan akan sejalan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan

pemerintah. (Irwan, 2011), (Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, 2015) dalam penelitiannya menyatakan SPIP berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. SAP yang konsisten di setiap SKPD menghasilkan laporan yang lebih akurat, sementara kompetensi teknis ASN dan mekanisme pengendalian yang efektif memperkuat akuntabilitas pelaporan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah, variabel yang terbatas, dan potensi bias dalam pengumpulan data melalui kuesioner. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pelatihan SAP, membangun sistem mentoring, dan melakukan evaluasi rutin SPIP. Untuk penelitian selanjutnya, perlu diperluas dengan variabel tambahan, studi komparatif, dan triangulasi data. Sementara itu, regulator dapat menyederhanakan pedoman SAP, memperkuat pengawasan berbasis risiko, dan menyediakan platform berbagi pengetahuan. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Referensi

- Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukit Tinggi). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Aryani, F. (2013). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II. *Tesis, Universita*.
- Djarwanto. (2011). *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Irwan, D. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Tesis, Universita*.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyani, S. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Umkm Di Kabupaten Kudus. *Unisnu Jepara*, 11(2), 137–150.
- Saragih, F. (2007). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen UMSU*, 8(1).
- Sari, A. P., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 1(8).
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Kota Semarang). *Tesis, Undip*.
- Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab. Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*, 14(2).
- Urban, G.-U. C. (n.d.). Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor. *Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Bagi Pemerintah Daerah Dan DPRD*.
- Wansyah, H., Darwin, & Bakar, U. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan SKPD Pada Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Warren, C.S. (2009). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh Kapasitas SDM, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera). *Tesis, Universita*.